



RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA 2022

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BLITAR

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas karunia dan ridhaNya, Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022 telah selesai disusun. Renja yang merupakan dokumen perencanaan satu tahunan ini menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 setelah mengalami perubahan struktur organisasi dan tata kelola pemerintah baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini terdiri dari Pendahuluan, Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah (PD) tahun lalu, tujuan, sasaran yang menggambarkan pencapaian rencana strategis Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Blitar, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.

Melalui Renja ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan serta pedoman bagi Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022 untuk dapat konsisten menjalankan fungsinya sebagai pengelola kepegawaian yang selalu berupaya mengedepankan inovasi dan kreativitas guna meningkatkan kinerjanya dalam melayani publik.

Semoga dokumen Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman dalam pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar pada tahun 2022. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022.

Blitar, 19 Juni 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Blitar



SUYOTO, S.Pd., M.Pd.

Pembina Utama Muda
NIP. 19631014 198403 1 004

DAFTAR ISI

	halaman
HALAMAN SAMPUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2016.....	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD.....	6
2.2. Analisis Pelayanan Kinerja Perangkat Daerah.....	38
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi BKD.....	45
2.4. Review tentang Rancangan Awal RKPD.....	46
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	56
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	57
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan-Kebijakan Nasional.....	57
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja.....	60
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..	63
BAB V PENUTUP	73
5.1. Catatan Penting	73
5.2. Kaidah-Kaidah	73
5.3. Rencana Tindak Lanjut	74

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD Kota Blitar dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020)..... 8
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD Kota Blitar dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d Tahun 2021)..... 17
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD dan Pencapaian Renstra BKD s/d Tahun 2019 Kota Blitar 31
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kota Blitar (Berdasarkan Renstra BKD Kota Blitar Tahun 2016-2021)..... 44
Tabel 2.5	Review Terhadap Rancangan Awal RKPDP Tahun 2021 Kota Blitar 47
Tabel 2.6	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022 56
Tabel 3.1	Tujuan Jangka Menengah Pelayanan OPD Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar 61
Tabel 3.2	Tujuan dan Sasaran BKD Kota Blitar Tahun 2022 62
Tabel 4.1	Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah 63
Tabel 4.2	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Pagu Indikatif Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022..... 65
Tabel 4.3	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2023..... 66

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renja BKD Tahun 2020.....	2
Gambar 2.1 Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar	40
Gambar 2.2 Profil Demografi Pegawai BKD Tahun 2019.....	41
Gambar 3.1 Perumusan Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	60



Bab I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Jenjang perencanaan daerah terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Ketentuan selanjutnya diatur dalam Undang – Undang nomor 23 tahun 2014 pasal 273 (2) dan (3) yang menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. RKPD dimaksud memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Secara hierarki penyusunan rencana kerja OPD merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah (BKD) merupakan dokumen perencanaan BKD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana kerja BKD merupakan terjemahan perencanaan tahunan di bidang kepegawaian, sehingga

bersifat lebih operasional yang dirumuskan dalam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan pengelolaan manajemen kepegawaian. Kebijakan perencanaan kepegawaian tersebut dirumuskan dan dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan percepatan pewujudan aparatur yang profesional, handal dan religius.

Proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar diawali dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang meliputi pembentukan tim penyusun Renja BKD, orientasi mengenai Renja BKD, penyusunan agenda kerja dan pengumpulan data dan informasi. Kemudian dilanjutkan dengan penyusunan rancangan Renja BKD yang meliputi tahap perumusan rancangan Renja BKD dan tahap penyajian rancangan Renja BKD. Proses penyusunan Renja BKD diakhiri dengan penetapan Renja BKD. Penetapan rancangan akhir Renja BKD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala BKD menetapkan Renja BKD untuk menjadi pedoman di lingkungan BKD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas BKD pada tahun 2022.

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Renja BKD Tahun 2022

Persiapan	Penyusunan Rancangan Kerja	Forum SKPD	Penetapan Renja
<ul style="list-style-type: none"> a. Pembentukan tim penyusun Renja b. Orientasi c. Penyusunan agenda kerja d. Pengumpulan data/informasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengolahan data dan informasi; b. Analisis gambaran pelayanan BKD; c. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD tahun lalu berdasarkan Renstra BKD; d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD; e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD; f. Perumusan tujuan dan sasaran; g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat (jika ada); h. Perumusan kegiatan prioritas; i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BKD; j. Penyempurnaan rancangan Renja BKD 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyelarasan program/ kegiatan b. Penajaman indikator dan target kinerja c. Penyelarasan program/ Kegiatan antar OPD d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyempurnaan rancangan Renja b. Verifikasi rancangan Renja c. Penetapan Kepala BKD

Seluruh dokumen rencana pembangunan merupakan satu kesatuan yang saling terkait satu sama lainnya, dimulai dari tingkat kebijakan, rencana kerja dan anggaran. Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja BKD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan BKD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) Kota Blitar dan Renstra BKD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja BKD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis yang digunakan sebagai dasar penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKD, untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Pada tahun 2022 dengan tema pembangunan "**PENGEMBANGAN SDM DAN PEMULIHAN EKONOMI DAERAH**" yang tertuang dalam prioritas dan sasaran pembangunan Kota Blitar tahun 2022 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Sehingga sasaran utama yang akan dicapai dilakukan dengan cara meningkatnya profesionalisme ASN yang sesuai dengan tujuan BKD yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Badan yang kemudian akan dijabarkan dalam rencana kerja tahun 2022.

1.2 Landasan Hukum

Dalam melaksanakan seluruh kegiatannya, Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar senantiasa mengacu kepada Peraturan Perundang-undangan atau landasan hukum yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan nomor 21 tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014 – 2019;
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Blitar Nomor 6 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Walikota Blitar Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 74);
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2021 nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 adalah:

1. Sebagai dasar penyusunan rencana kegiatan anggaran tahun 2022;
2. Sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022;
3. Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya;
4. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahun selanjutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022 adalah :

1. Tercapainya tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawain Daerah Kota Blitar;

2. Terlaksananya program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar tahun 2022;
3. Meningkatnya capaian target program dan kegiatan tahun sebelumnya.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Rencana kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar tahun 2022 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini menguraikan tentang Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menjelaskan telaahan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, tujuan dan sasaran perangkat daerah

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisi tentang penjelasan faktor – faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, penjelasan rumusan program dan kegiatan serta menampilkan tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2022 dan Prakiraan Maju tahun 2023.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi uraian penutup, berupa Catatan penting, Kaidah – kaidah pelaksanaan dan Rencana Tindak Lanjut.



Bab II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja BKD Tahun Lalu dan Capaian Renstra BKD

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKD kota Blitar tahun lalu (2020) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2021) dengan mengacu pada APBD tahun 2021. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Bappeda Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2020 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Perkantoran
2. Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
5. Program Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur

Pada tahun 2020, BKD Kota Blitar melaksanakan 5 (lima) program dengan 14 (empat belas) kegiatan. Anggaran Belanja Langsung tahun 2020 sebesar Rp. 7.882.717.650,-. Dari jumlah anggaran tersebut, terealisasi sebesar Rp. 6.449.056.668,- atau 81,81%

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2021 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
2. Program Kepegawaian Daerah ;
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan s/d tahun 2020)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase ASN yang mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	100	%	304	97%	-	100,00		100	52,4
Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Pendataan ASN untuk Jabatan Administrator dan Jabatan Fungsional yang dibutuhkan	6	dokumen	4 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah Peserta Rapat Identifikasi Kebutuhan ASN	500	orang	300 orang	100 orang	100 orang				
	Jumlah SK Perpanjangan PTT	169	SK	85 SK	2 SK	3 SK				
	Jumlah Seleksi Penerimaan ASN (CPNS dan PPPK)	8	kali	1 kali	1 kali	1 kali				
	Jumlah SK Pengangkatan CPNS	415	SK	218 SK	198 SK	197 SK				
	Jumlah dokumen sumpah janji PNS	340	dokumen	240 dokumen	218 dokumen	214 dokumen				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah SK Batas Usia Pensiun (BUP), Atas Permintaan Sendiri (APS), Masa Persiapan Pensiun (MPP), Pensiun Janda/Duda yang terbit	735	SK	464 SK	143 SK	156 SK				
	Jumlah Fasilitas penerbitan Kartu Identitas Pensiun (KARIP)	735	kartu	454 kartu	143 Kartu	103 kartu				
	Jumlah Peserta sosialisasi sekolah kedinasan	700	orang	400 orang	0 orang	0				
	Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis BUP	735	orang	523 orang	0 orang	0				
	Jumlah calon STTD pola pembibitan yang direkomendasikan Pemkot Blitar	6	orang	3 orang	3 orang	3 orang				
	Jumlah SK Pengangkatan PNS	340	SK	189 SK	217 SK	217 SK				
Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	Jumlah ASN yang terdokumentasi data dalam data digital kepegawaian	14828	Orang	14256 orang	1500 orang	1500 orang				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian	4512	orang	3008 orang	600 orang	600 orang				
Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN	Jumlah SKP yang terevaluasi	3000	SKP	807 dokumen	750 dokumen	1002 dokumen				
	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan	1304	orang	1293 orang	200 orang	230 orang				
	Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti	750	Orang	1548 orang	300 orang	320 orang				
	Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti	480	%	77 orang	80%	80%				
	Jumlah Karis/Karsu yang terbit	374	Buah	241 buah	50 buah	238 buah				
	Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti	480	%	400%	80%	80 %				
	Jumlah LP2P yang dilaporkan	12416	Buah	7017 buah	2000 buah	1730 buah				
	Jumlah LHKPN yang dilaporkan	850	Orang	348 orang	150 buah	186 buah				
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian	1000	Orang	728 orang	0	0				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan motivasi pegawai	1800	Orang	1525 orang	0	60 orang				
	Jumlah peserta pemantapan tugas	1000	Orang	422 orang	100 orang	0				
	Jumlah inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan	33	Kali	26 kali	5 kali	1				
	Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja	19092	Paket	10392 paket	0	1				
	Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan	379	Orang	192 orang	5 orang	4 orang				
Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier ASN	Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK	11200	orang	9499 orang	2250 orang	1426 orang				
	Jumlah peserta sosialisai jabatan fungsional	275	orang	565 orang	0	0				
	Jumlah SK penempatan ASN sesuai kompetensi	2552	orang	2657 orang	300 SK	480 SK				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah ASN yang mengikuti assesment	75	orang	0	100 orang	100 orang				
Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Prajabatan/Latsar Bagi CPNS Daerah	415	orang	229 orang	0	0				
	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Struktural	271	orang	155 orang	1 orang	1 orang				
	Jumlah ASN yang Mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	447	orang	989 orang	188 orang	156 orang				
	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Dampak Diklat	3	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen				
	Jumlah fasilitasi kebutuhan Gedung Pengembangan SDM	3	tahap	2 tahap	0	0				
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Mengikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah yang ditindaklanjuti	90	%	104%	0	0				
	Jumlah ASN yang Mengikuti Peningkatan Etos Kerja	2552	orang	962 orang	0	0				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Persentase ASN Mengajukan Ijin Tugas Belajar dan Ijin Belajar yang Ditindaklanjuti	98	%	222 %	98%	98%				
	Jumlah OPD yang tersusun Standart Kompetensi Jabatannya	24	OPD	18 OPD	6 OPD	6 OPD				
Program Pelayanan Perkantoran	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100	%	322%	100	138,46				
Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	408	jenis	266 jenis	68	68				
	Jumlah barang cetakan yang tersedia	98	jenis	62 jenis	16	16				
	Jumlah lembar penggandaan	827096	lembar	525724 lembar	103617	144739				
	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia	4320	buah	2880 buah	720	720				
	Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia	9049	dos	3203 dos	1500	1201				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	375	kali	413 kali	45	56	100		210	100
Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	6	Rekening	5 rekening	1	1	100		4	100
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	42	unit	27 unit	7	7	100		13	100
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	53	unit	3 unit	11	11				
	Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	8	jenis	48 jenis	1	1				
	Jumlah perlengkapan bangunan kantor yang terpelihara	72	jenis	179 jenis	24	24				
	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	504	unit	508 unit	144	178				
	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12	unit	10 unit	2	2				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		5	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	0	-	-	1	0				
Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	36	dokumen	22 dokumen	4	4	100		9	100
Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen yang tersusun	18	dokumen	7 dokumen	4	4	100		9	100
Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100	%	300%	100	100	100		100	100
Fasilitasi keperansertaan pada even daerah dan hari besar nasional	Jumlah even daerah dan hari besar nasional yang diikuti	8	even	16 even	1	1	100		8	100
	Jumlah pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang diberikan gaji	636	orang	480 orang	82	82	100		30	100
Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah	Jumlah publikasi informasi program/kegiatan perangkat daerah	12	kali	10 kali	1	1	100		8	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100	%	333%	100	100				

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2019	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Nilai SKM	BAIK		BAIK	BAIK	BAIK				
Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun	36	dokumen	26 dokumen	12	12	100		13	100

Sumber : BKD Kota Blitar Tahun 2021

Tabel. 2.2.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021 (Realisasi Target Kinerja Program dan Kegiatan sampai dengan tahun 2021 –
Sesuai Permendagri 90 Tahun 2019)

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase peningkatan pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	100	%		100					
	Persentase peningkatan data kepegawaian yang valid	100	%							
	Persentase peningkatan penempatan jabatan sesuai kompetensi	100	%							
	Persentase peningkatan ASN yang memiliki nilai penilaian prestasi kerja minimal 80	100	%							
	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	100	%							

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Usulan Formasi ASN									
	Persentase Layanan Pensiun Tepat Waktu									
	Persentase data kepegawaian yang dikelola									
	Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan (CPNS dan PPPK)	623	orang		214	0	0,00			
	Jumlah dokumen Pendataan ASN untuk jabatan administrator dan jabatan fungsional yang dibutuhkan	6	dokumen		1	3	300,00			
	Jumlah dokumen sumpah janji PNS	318	dokumen		218	214	0,00			
	Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan	673	kartu		218	0	0,00			
	Jumlah peserta rapat identifikasi kebutuhan ASN	500	orang		100	0	0,00			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah peserta sosialisasi sekolah kedinasan	700	orang							
	Jumlah seleksi penerimaan ASN (CPNS dan PPPK)	8	Kali		2	0	0,00			
	Jumlah SK Pengangkatan CPNS Formasi 2021	415	SK		198	0	0,00			
	Jumlah SK Pengangkatan PNS Formasi 2019	340	SK		218	214	0,00			
	Jumlah SK Pengangkatan PPPK	206	SK		0	0	0,00			
	Jumlah SK perpanjangan dan pemberhentian PTT	169	SK		2	0	0,00			
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Kartu Identitas Pensiun KARIP yang terbit	735	Kartu		143	29	20,28			
	Jumlah Pensiunan yang memperoleh Tunjangan Hari Tua (THT dan pensiun bulanan)									
	Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis BUP 2020									

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah SK batas usia pensiun (BUP) atas permintaan diri sendiri (APS), Masa persiapan pension (MPP), Pensiun Janda/ Duda yang Terbit	735	SK		143	34	23,78			
Evaluasi data, Informasi dan Sitem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian	4512	Orang		600	150	25,00			
	Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian	14828	Orang		1500	375	25,00			
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Hibah Korpri									
Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan									
Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah SK Penempatan ASN sesuai Kompetensi									
	Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK									
	Jumlah peserta sosialisasi Jabatan Fungsional									

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya									
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah SKP yang dievaluasi	3000	SKP		750	1002	133,60			
Evaluasi data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian	4512	orang		600	150	25,00			
	Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian	14828	orang		1500	375	25,00			
	Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan									
	Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja									
	Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan	1304	orang		150	230	133,60			
	Jumlah Inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan	33	kali		5	1	20,00			
	Jumlah KARIS/ KARSU yang terbit	374	buah		50	238	476,00			
	Jumlah LHKPN yang dilaporkan	850	orang		150	186	124,00			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah LP2P yang dilaporkan	12416	Buah		2000	1730	86,50			
	Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti	750	orang		300	320	106,67			
	Jumlah peserta pemantapan tugas	1000	orang		0	0	00,00			
	Jumlah peserta peningkatan motivasi pegawai	1800	orang		100	60	60,00			
	Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian	1000	orang		0	0	00,00			
	Persentase Kasus indisipliner yang ditindaklanjuti	480	%		80	80	100,00			
	Persentase ijin cerai yang ditindaklanjuti	480	%		80	80	100,00			
Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang memperoleh peningkatan Kapasitas ASN	85	%		75	59,28	79,03			
	Persentase ASN yang mengikuti diklat									
Pengelolaan Administrasi diklat dan sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah	6	dokumen		1	0	00,00			

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat struktural	447	orang		1	0	00,00			
	Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis /fungsional	271	orang		188	156	82,98			
	Jumlah dokumen Analisa kebutuhan diklat (AKD)									
	Jumlah fasilitasi gedung pembangunan SDM	6	dokumen		1	0	00,00			
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peningkatan Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah									
Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis									

Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
		3	4		6	7	8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Teknis umum, Inti dan pilihan bagi jabatan Administrasi, Penyelenggaraan urusan pemerintahan Konkuren Perangkat Daerah penunjang urusan Pemerintahan umum	Jumlah ASN yang mengikuti fit & proper test	730	orang		0	0	00,00			
	Jumlah PD yang mempunyai standart kompetensi jabatan									
	Jumlah peserta miniworkshop									
	Persentase ASN mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti	90	%		0	0	00,00			
	Persentase ASN mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti									
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SKM	Baik						Baik	0	0%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%					100	0	0%

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	10	dokumen					10	6	
Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target RPJMD Kota Blitar pada Tahun 2021		Realisasi Capaian Kinerja RPJMD Kota Blitar sampai dengan RKPD Kota Blitar Tahun 2020	Target Kinerja dan Anggaran RKPD Kota Blitar Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD Kota Blitar s/d Tahun 2021
					Target Renja Tahun 2020	Realisasi Renja Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen Pelaporan Perangkat Daerah yang dihasilkan	7	dokumen					7	3	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%					100	50	50%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	29	orang					29	29	100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis laporan Keuangan yang Tesusun (bulanan / semesteran)	3	dokumen					3	1	33,3%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%					100	0	0%

Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan	Jumlah even Daerah dan hari besar nasional yang diikuti	1	even					1	0	0%
	Jumlah pegawai yang mendapatkan fasilitasi pembinaan kepegawaian	30	pegawai					30	30	100%
	Jumlah publikasi program / kegiatan perangkat daerah	10	publikasi					10	4	40%
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%					100	50%	50%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan gedung kantor yang terpenuhi	3	macam					3	0	0%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	11	macam					11	4	36,4%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos / kotak / porsi makanan dan minuman yang tersedia	960	dos					960	320	33,33%
	Jumlah Jenis alat tulis kantor yang tersedia	48	macam					48	24	50%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	5	macam					5	2	40%
	Jumlah lembar penggandaan	34621	lembar					34621	17311	50%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	1440	ekspl					1440	600	41,7%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	120	rakor					120	74	61,7%

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%					100	50	50%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3	rekening					3	3	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah iuran kebersihan yang terbayarkan	12	bulan					12	6	
	Jumlah jenis jasa surat menyurat yang tersedia	1	macam					1		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%					100	0	0%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara	3	unit					3	3	100%
	Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	10	unit					10	3	30%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	2	jenis					2	1	50%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bangunan kantor yang terpelihara	1						1	0	0%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	12	unit					12	8	66,7%

Sumber : BKD Kota Blitar Tahun 2021

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Pada tahun 2019 terdapat 4 (kegiatan) kegiatan yang tingkat realisasi kinerjanya dibawah 100%, yakni :

1. Kegiatan Pengadaan dan Pemberhentian ASN

Kegiatan ini terdiri dari 12 (dua belas) indikator kinerja, dimana dari indikator – indikator tersebut ada 3 (tiga) indikator yang realisasi kinerjanya tidak memenuhi target yang direncanakan, yaitu Jumlah ASN yang menguji uji kesehatan sebesar 98,62%, Jumlah kartu pegawai yang diusulkan sebesar 6,91%, jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis BUP sebesar 99%.

Relalisasi anggaran pada kegiatan ini hanya mencapai 27,28% hal tersebut disebabkan karena perubahan mekanisme perekrutan CPNS oleh pemerintah pusat, dimana ada beberapa tahapan pelaksanaan CPNS formasi 2019 tidak direalisasikan di tahun 2019, tetapi pada tahun 2020.

2. Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan

Kegiatan ini terdiri dari 14 (empat belas) indikator kinerja, dimana dari indikator – indikator tersebut ada 5 (lima) indikator yang realisasi kinerjanya tidak memenuhi target yang direncanakan, yaitu Jumlah SKP yang terevaluasi sebesar 44,44%, Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti sebesar 51,25%, jumlah LP2P yang dilaporkan sebesar 73,45%, Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian sebesar 85%, jumlah peserta pemantapan tugas sebesar 35%, Realisasi anggaran pada kegiatan ini hanya mencapai 74,83%. Salah satu penyebab realisasi anggaran adalah aktifitas sosialisasi LHKPN tidak dilaksanakan karena nara sumber dari KPK yang tidak bias hadir.

3. Pengembangan Kompetensi Aparatur

Kegiatan ini terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja, dimana dari indikator – indikator tersebut ada 2 (dua) indikator yang realisasi kinerjanya tidak memenuhi target yang direncanakan, yaitu Persentase ASN yang mengikuti ujian dinas dan pnyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti sebesar 15,56%, Jumlah ASN yang mengikuti etos kerja sebesar 25%. Realisasi anggaran pada kegiatan ini hanya mencapai 83,13% hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan etos kerja tidak direalisasikan sesuai dengan rencana awal karena adanya perubahan peserta. Perubahan peserta peningkatan kapasitas, semula kepala OPD, kabag. Setda, setwan dan lurah berubah menjadi kepala OPD, kabag. Setda dan setwan.

4. Pendidikan dan Pelatihan ASN

Kegiatan ini terdiri dari 5 (lima) indikator kinerja, dimana dari indikator – indikator tersebut ada 1 (satu) indikator yang realisasi kinerjanya tidak memenuhi target yang direncanakan, yaitu Jumlah ASN yang mengikuti diklat prajabatan bagi CPNS Daerah sebesar 97,31%. Realisasi anggaran pada kegiatan ini hanya mencapai

93,32% hal tersebut disebabkan karena adanya peserta CPNS yang mengundurkan diri setelah diterima CPNS, selain itu juga efisiensi anggaran.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Sebagian besar kegiatan, yakni 10 (sepuluh) kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar pada tahun 2019 dapat memenuhi target kinerja 100%. Antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Perkantoran;
2. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah;
3. Kegiatan Penyusunan, Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran;
4. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
5. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan .
6. Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Pegawai;
7. Kegiatan Pengelolaan Publikasi dan Informasi Perangkat Daerah;
8. Kegiatan Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;
9. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
10. Kegiatan Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karier.

2.1.3 Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya atau Terpenuhinya atau Target Kinerja Program/Kegiatan

Berdasarkan evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Ada beberapa kegiatan yang anggarannya kurang sehingga harus ada pergeseran di perubahan anggaran yang dapat mengakibatkan tidak terserapnya sebagian anggaran karena keterbatasan waktu.
2. Pengesahan anggaran tidak tepat waktu, sehingga kegiatan yang seharusnya telah dilaksanakan pada awal tahun menjadi mundur pelaksanaannya sampai anggaran disahkan. Hal tersebut mengakibatkan tenggang waktu pelaksanaan kegiatan menjadi berkurang sampai dengan akhir tahun, sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Adanya perubahan kebijakan pimpinan pada tahun berjalan, mengakibatkan perubahan target kinerja yang menyebabkan ketidaksesuaian dengan target kinerja sehingga mengurangi realisasi anggaran.
4. Adanya kebijakan pusat terkait rekrutmen CPNS yang menyebabkan perubahan mekanisme pelaksanaan dan realisasi anggaran.

2.1.5 Implementasi yang Timbul terhadap Target Capaian Program Renstra BKD

Implementasi yang timbul dari tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan terhadap target capaian program Renstra BKD selanjutnya adalah, bahwa dalam perencanaan target berikutnya harus melihat hasil evaluasi kinerja pelaksanaan Renja tahun sebelumnya. Bila pelaksanaan Renja OPD tahun lalu mempunyai kinerja kurang baik, maka berpeluang untuk menetapkan target kinerja diturunkan menjadi lebih rendah atau sebanding dengan tahun sebelumnya.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target Kinerja Program/Kegiatan

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran, ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
2. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
3. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu, sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKD dan
Pencapaian Renstra BKD s/d Tahun 2019
Kota Blitar

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra PD tahun 2016-2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Sampai dengan Tahun Berjalan (2020)				
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2020 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)			
1.20	33												
1.20	33	1		Badan Kepegawaian Daerah									
				PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	0	85%	80%	100%	100%	165%	173%
				Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	402 jenis	269 jenis	68 jenis	68 jenis	100%	68 jenis	337 jenis	83,83%
					Jumlah jenis barang cetakan yang tersedia	96 jenis	63 jenis	16 jenis	16 jenis	100%	16 jenis	79 jenis	82,3%
					Jumlah Lembar Penggandaan	611.628 lembar	300.000 lembar	105.000 lembar	105.000 lembar	105.000 lembar	106.628 lembar	405.000 lembar	66,22%
					Jumlah jenis Bahan bacaan yang tersedia	12 jenis	6 jenis	2 jenis	2 jenis	100%	2 jenis	10 jenis	83,33%
					Jumlah paket makanan dan minuman yang tersedia	8.586 dos	3208 dos	990 dos	990 dos	100%	1.248 dos	4456 dos	51,89%
				Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	375 kali	202	45 kali	65 kali	115,55%	45 kali	312 kali	83,2%
1.20	33	2		Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana	Jumlah rekening yang terbayarkan	6 rekening	3 rekening	1 rekening	1 rekening	100%	1 rekening	5 rekening	83,33%
					Jumlah kendaraan yang terbayarkan pajaknya	42 unit	21 unit	7 unit	7 unit	100%	7 unit	35 unit	83,33%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra PD tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai dengan Tahun Berjalan (2020)				
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2020 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)			
	Prasarana Perkantoran	Jumlah peralatan kantor yang terpenuhi	49 jenis	6	32 unit	6 jenis	100%	13 jenis	19 jenis	51,02%			
		Jumlah perlengkapan kantor yang terpenuhi	8 jenis	3 jenis	96 unit	1 qajenis	100%	2 jenis	6 paket	75%			
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara											
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	72 jenis	44 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	56 jenis	77,77%			
		Jumlah jenis meubelair yang terpenuhi	15 jenis	0	5	5	100%	5	10 jenis	66,67%			
		Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	12 unit	6 unit	2 unit	2 unit	100%	2 jenis	10 jenis	83,33%			
		Jumlah kendaraan dinas yang dibeli	72 jenis	44 jenis	12 jenis	12 jenis	100%	12 jenis	56 jenis	77,77%			
	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang tersusun			4 dokumen	4 dokume	100%						
	Penyusunan Laporan Keuangan	Jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun			4 dokumen	4 dokume	100%						
1.20	33	05		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	Tingkat Partisipasi Aktif Perangkat Daerah Dalam Agenda Kota	100%	0	100%	100%	100%	100%	200%	200%
1.20	33	05	11	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Pegawai	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	24 kegiatan	8 kegiatan	4 kegiatan	4 kegiatan	100%	4 kegiatan	16 kegiatan	66,67%
				Pengelolaan publikasi	Jumlah pegawai honorer/pegawai tidak tetap yang diberikan gaji			84 orang	84 orang	100%			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra PD tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai dengan Tahun Berjalan (2020)				
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2020 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)			
		program/kegiatan perangkat daerah											
1.20	33	05	12	Penyebarluasan Informasi Program / Kegiatan SKPD	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	12 kali	4 kali	2 kali	2 kali	100%	2 kali	8 kali	66,67%
1.20	33	6		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.20	33	6	1	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya dokumen capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	36 dokumen	15 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100%	6 dokumen	26 dokumen	72,22%
1.20	33	27		PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBERDAYA APARATUR	Prosentase ASN yang Memeperoleh Kesempatan Peningkatan Kompetensi	85%	45%	55%	58,6%	106,55%	65%	56,2%	66,12%
				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang hasil Fit & Proper Testnya memenuhi kompetensi	730 org	150 org	200 org	276 org	138%	337 org	763 org	104,5%
					Persentase ASN yang mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang dtindaklanjuti	250 org	0	70 org	65 org	92,86%	75 org	75 org	56%
					Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan etos kerja	2552 org	706 org	236 org	212 org	89,83%	170 org	1088 org	42,63%

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai dengan Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah ASN yang memperoleh ijin tugas belajar dan ijin belajar	300 org	89 org	50 org	104 org	208%	50 org	243 org	81%
		Jumlah Perangkat Daerah yang memiliki Standart Kompetensi Jabatan								
		Jumlah CPNS mengikuti Orientasi	302 org	0	0	0	0	223 org	223 org	73,4%
	Pendidikan dan Pelatihan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)								
		Jumlah ASN mengikuti Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah	249 org	10 org	2 org	2 org	100%	223 org	235 org	94,37%
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	271 org	106 org	50org	50 org	100%	52 org	208 org	76,75%
		Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional	1.710 org	691 org	250 org	321 org	128,4%	150 org	1162 org	67,95%
1.20	33	27	5	Jumlah Dokumen Evaluasi Dampak Diklat (EDD)						
		Jumlah Tahapan Pembangunan Gedung Kantor								
	Mutasi, Promosi dan Pengembangan Karir ASN	Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK	11200 org	5897 org	1450 org	1421 org	98%	2.100 org	9418 org	84,09%
		Jumlah peserta sosialisasi jabatan fungsional	240 org	400 org	40	90	225%	60 org	550 org	229,16%
		Jumlah SK penempatan ASN Sesuai Kompetensi	5173 org	2291 org	500 org	488 org	97,6%	500 org	3.279 org	63,38%
		Jumlah ASN yang mengikuti Assesment								

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Capaian Program (Renstra PD tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai dengan Tahun Berjalan (2020)				
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2020 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)			
1.20	33	28		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN APARATUR	Prosentase ASN yang Mendapatkan Pembinaan dan Pengembangan	100%	0	87%	87%	100%	90%	90%	90%
1.20	33	28	1	Pengadaan dan Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen pendataan ASN untuk jabatan administrator dan jabatan fungsional yang dibutuhkan			1 dokumen	1 dokumen	100%			
					Jumlah peserta rapat identifikasi kebutuhan ASN			100 orang	100 orang	100%			
					Jumlah SK Perpanjangan dan Pemberhentian PTT			85 SK	85 SK	100%			
					Jumlah seleksi penerimaan ASN (CPNS dan PPPK)			2 kali	2 kali	100%			
					Jumlah SK Pengangkatan CPNS			217 SK	217 SK	100%			
					Jumlah SK Pengangkatan PPPK								
					Jumlah ASN yang mengikuti Uji Kesehatan			217 orang	217 orang	100%			
					Jumlah KARPEG, KPE, Taspen yang diusulkan			217 kartu	217 kartu	100%			
					Jumlah SK Batas Usia Pensiun (BUP), Atas Permintaan Sendiri (APS) Tidak Cakap jasamani/Rohani, Masa Persiapan Pensiun (MPP), Pensiun Janda/Duda yang terbit			125 SK	125 SK	100%			
					Jumlah Kartu Identitas Pensiun yang terbit			125 SK	125 SK	100%			
					Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis BUP			200 orang	200 orang	100%			
					Jumlah peserta sosialisasi sekolah kedinasan								
					Jumlah dokumen sumpah janji PNS			217 SK	217 SK	100%			

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra PD tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai dengan Tahun Berjalan (2020)				
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2020 (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)			
		Jumlah SK Pengangkatan PNS											
1.20	33	28	5	pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Jumlah ASN yang terdokumentasi data dalam data digital kepegawaian	20722 data	10652 +6376data	1504 data	1504 data	100 %	1504 data	18532	89,43%
					Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian			752 orang	752 orang	100%			
				Pembinaan Disiplin, Penilaian Kinerja dan Penghargaan ASN	Jumlah SK yang terevaluasai								
					Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan								
					Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti								
					Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti								
					Jumlah KARIS/KARSU yang terbit								
					Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti								
					Jumlah LP2P yang dilaporkan								
					Jumlah LHKPN yang dilaporkan								
					Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Kepegawaian								
					Jumlah peserta peningkatan motivasi pegawai								
					Jumlah peserta pementapan tugas								

Kode	Urusan /Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program Program (Renstra PD tahun 2016- 2021)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan tahun Lalu (2019)			Target Program/ Kegiatan Renja PD tahun 2020	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Sampai dengan Tahun Berjalan (2020)	
					Target Renja PD tahun 2019	Realisasi Renja PD tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target s.d Tahun 2020 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
		Jumlah Inspeksi Mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan								
		Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja								
		Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan								

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan BKD

Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah yang berisikan kedudukan dan uraian tugas Kepala Badan, Sekretariat, Kepala Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Kepegawaian Daerah, dimana untuk melaksanakan tugas pokok tersebut BKD Kota Blitar mempunyai fungsi sebagai berikut :

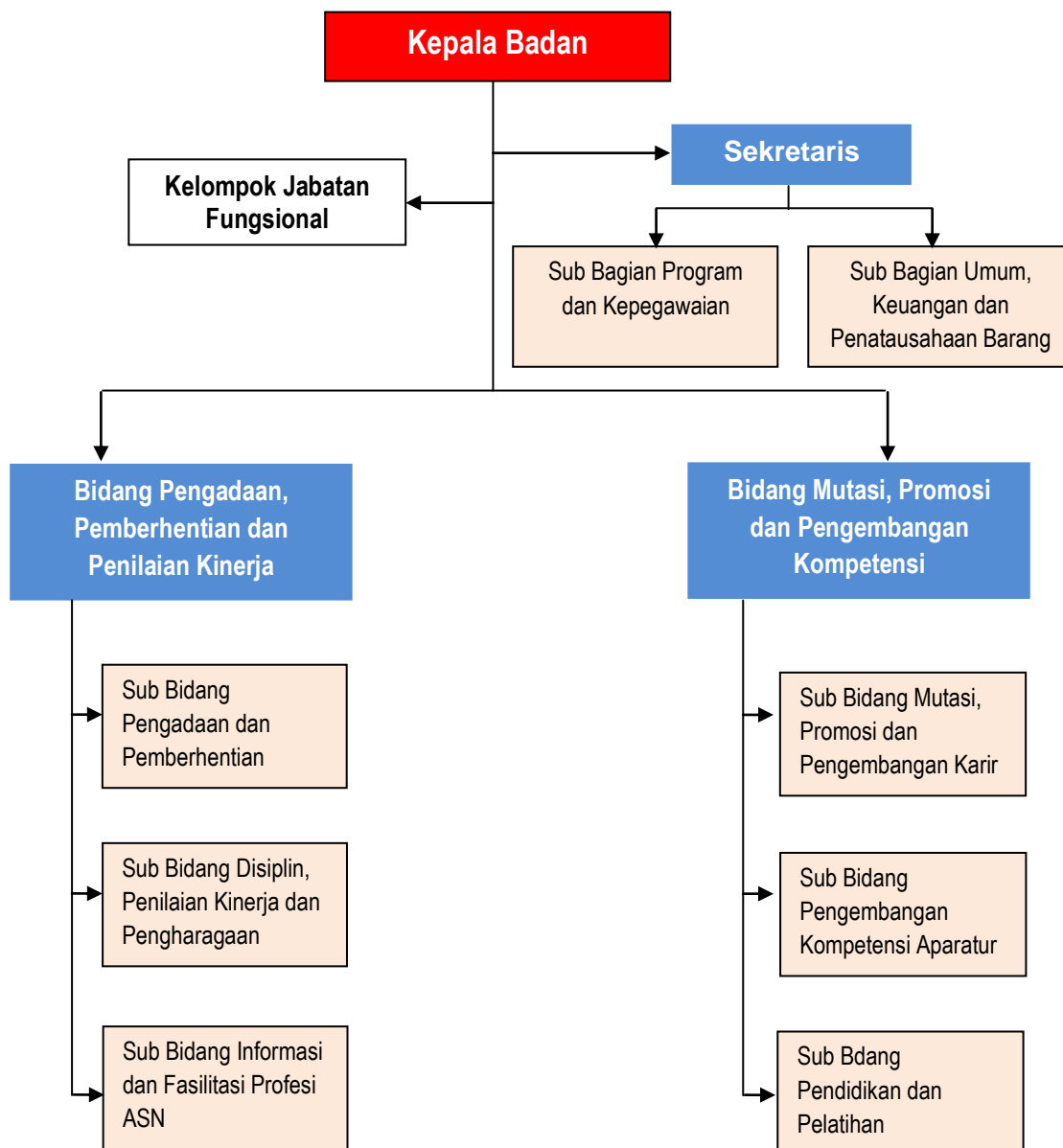
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program pengembangan dan pembinaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Perencanaan operasional dan pelaksanaan program kesejahteraan dan penghargaan pegawai;
5. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian PNS daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Penyusunan, penetapan, pengusulan dan pelaksanaan pengadaan formasi PNSD Kota;
7. Pelayanan dan pembinaan administrasi kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di lingkungan kota;
8. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan urusan rumah tangga Badan;
9. Pengendalian, pengawasan dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan dan pelaksanaan tugas Badan;
10. Pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
11. Penetapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkup Badan Kepegawaian Daerah;
12. Perumusan pengukuran kepuasan pengguna layanan;
13. Pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang kepegawaian;
14. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
15. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai kewenangan :

1. Penetapan kebijakan operasional di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
2. Menetapkan dan mengembangkan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
3. Pelaksanaan pengangkatan CPNS di lingkungan kota;
4. Pelaksanaan orientasi tugas dan prajabatan;
5. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai daerah;
6. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah;
7. Penetapan CPNSD menjadi PNSD di lingkungan kota;
8. Penetapan kenaikan pangkat PNSD kota menjadi golongan ruang I/b s/d III/d;
9. Pengusulan penetapan kenaikan pangkat anumerta dan pengabdian;
10. Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS Kota dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat, kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota;
11. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah Kota Blitar;
12. Pengusulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon II PNS Kota;
13. Penetapan perpindahan PNSD Kota;
14. Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD di Kota;
15. Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d kebawah;
16. Penetapan pemberhentian PNSD Kota golongan ruang III/d kebawah dan pemberhentian sebagai CPNSD Kota;
17. Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD di Kota;
18. Penyiapan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai daerah;
19. Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota;
20. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNS di lingkungan kota.

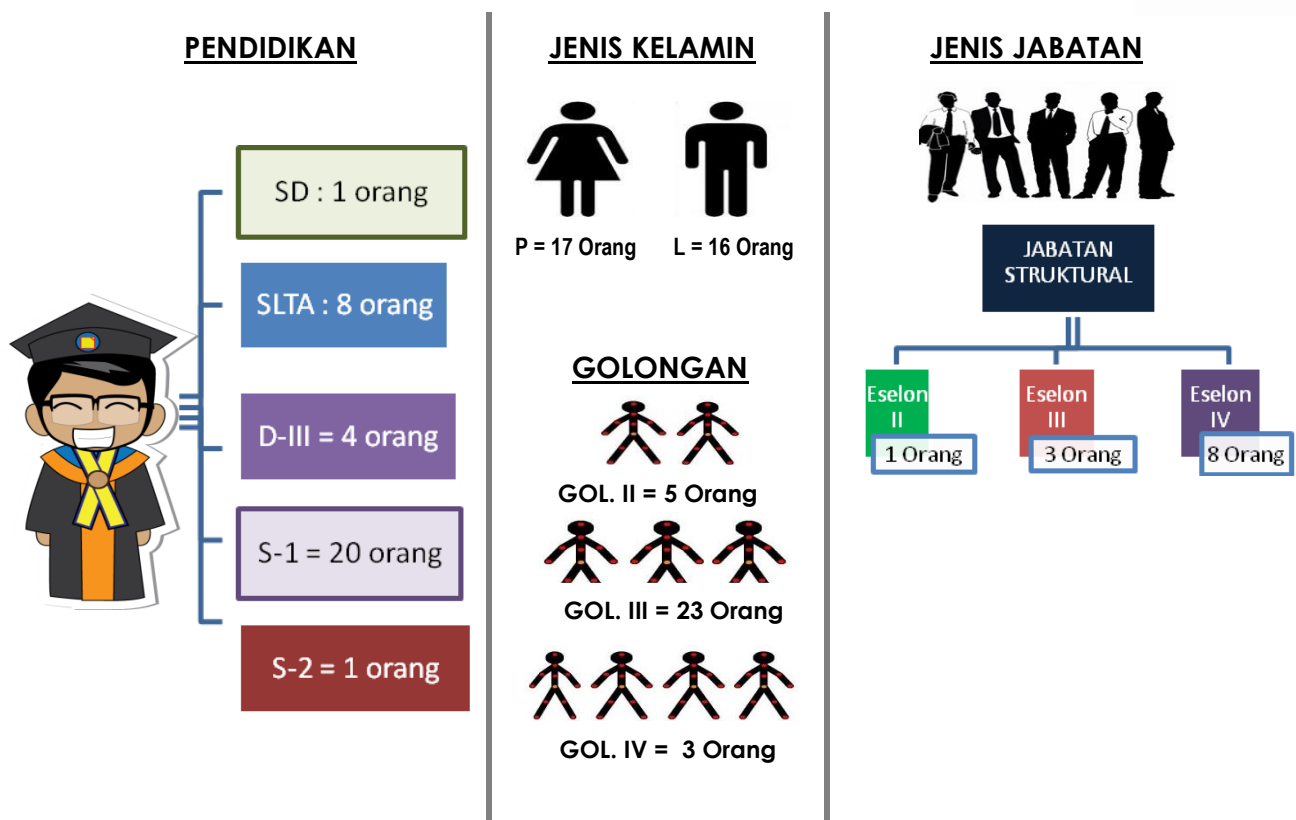
Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar sebagai lembaga teknis daerah pada Pemerintah Kota Blitar memiliki Struktur Organisasi sebagaimana disajikan dalam Gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1
Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar



Berjalannya organisasi BKD sangat ditentukan oleh kuantitas maupun kualitas sumber daya manusia aparatur. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan tanggal 31 Maret 2021, BKD didukung oleh pegawai sebanyak 35 orang, dengan profil demografi sebagai berikut :

Gambar 2.2
Profil Demografi Pegawai BKD Tahun 2021
Jumlah Pegawai = 35 Orang



Berdasarkan Renstra Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2021 - 2026, BKD memiliki 2 (dua) sasaran strategis yang dijabarkan dalam indikator kinerja utama dengan pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebagai berikut:

- Kinerja Utama : Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik**

Indikator : Indeks Sistem Merit

Capaian sasaran strategis pertama dengan Indikator Indeks Sistem Merit, dimana indikator ini merupakan indikator kinerja baru. Dan untuk tahun 2020 dalam pencapaian kinerja utama, tidak ditargetkan, namun tetap dihitung dengan realisasi 208.

- Kinerja Utama : Meningkatnya Kompetensi ASN**

Indikator : Peningkatan Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN

Capaian sasaran strategis kedua dengan Indikator Peningkatan Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN merupakan indikator kinerja baru dalam pencapaian kinerja utama, sehingga pada tahun 2020 tersebut tidak ditargetkan, namun tetap dihitung dengan realisasi 8,30%.

Keberhasilan sasaran tersebut dipengaruhi oleh:

1. Penempatan pejabat struktural di Kota Blitar berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016
2. Untuk penempatan dalam jabatan, BKD selama ini membuat bahan kebijakan dengan menggunakan peraturan terkait dengan pengembangan karir PNS, yaitu model pengembangan karir yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural, yang mencakup : (1) Pendidikan; (2) Kesesuaian latar belakang pendidikan dan jabatan; (3) Pendidikan dan pelatihan dalam jabatan; Diklat Kepemimpinan; (3) Masa kerja; (4) Pangkat dan golongan ruang; (5) Penilaian kinerja internal yang dilakukan oleh OPD
3. Khusus untuk penempatan Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) telah diatur tata caranya dengan Seleksi Terbuka berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Pemerintah yang mengatur proses pelaksanaan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dengan kualifikasi, kompetensi dan kinerja yang dibutuhkan. Peraturan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 821.22/5992/sj tanggal 29 Oktober 2014 perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah dan Kabupaten/Kota
4. Koordinasi yang baik dengan masing-masing bidang pendukung dalam pencapaian target, sehingga Indikator Persentase Rekrutmen, Penempatan dan Promosi Aparatur berdasarkan Kompetensi dapat dicapai dengan melalui pelaksanaan beberapa kegiatan lintas bidang

Di samping itu, juga terdapat beberapa faktor penghambat yaitu belum adanya hasil analisis beban kerja untuk bahan penataan sumber daya manusia dan implementasi hasil pemetaan kompetensi jabatan, serta belum adanya hasil analisis jabatan untuk jabatan fungsional umum/ pelaksana sebagai bahan dasar penyusunan standar kompetensi JFU di lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagai dasar penempatan dalam jabatan fungsional umum.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kota Blitar untuk meningkatkan capaian kinerja persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi antara lain :

1. Untuk penempatan dalam jabatan struktural, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan kerjasama dengan pihak luar yang berkompeten dalam melakukan *assessment* kompetensi dan *talent mapping* terhadap pejabat struktural dan fungsional umum
2. Berkoordinasi dengan unit kerja yang memiliki Tupoksi dalam penyelesaian Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja
3. Menggunakan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang telah ditetapkan sebagai bahan dalam analisis jabatan
4. Berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan Organisasi dalam hal penetapan nama-nama dan uraian tugas jabatan fungsional umum, sehingga ke depan penempatan pegawai dapat langsung dimunculkan nama jabatan termasuk jabatan fungsional umum
5. Penyusunan pola karier PNS yang mencakup berbagai variabel sehingga dapat mempengaruhi karier PNS dan dapat mengakomodir pola karier secara diagonal, serta melakukan penetapan Pola Karier PNS dalam bentuk Peraturan Walikota
6. Menyusun dan menetapkan standar kompetensi jabatan PNS dalam bentuk Peraturan Walikota
7. Membuat daya tarik yang sama dan melakukan distribusi penempatan PNS yang merata sesuai kebutuhan di setiap OPD untuk mengantisipasi adanya penumpukan PNS di salah satu OPD.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKD Kota Blitar
(Berdasarkan Renstra BKD Kota Blitar Tahun 2016-2021)

No	Indikator	SPM	IKK	Target Renstra BKD					Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	Tahun 2017 (n-3)	Tahun 2018 (n-2)	Tahun 2019 (n-1)	Tahun 2020 (n)	Tahun 2021 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(14)		
1.	Persentase Penempatan dan Promosi Aparatur sesuai dengan Kompetensinya			70%	80%	85%	90%	95%	70,37%	83,77%	94,32%	95%	97%	Didukung peran aktif ASN untuk meningkatkan kompetensi dengan peningkatan jenjang pendidikan, mengikuti ujian dinas dan penyesuaian ijazah, mengikuti diklat yang sesuai dengan tupoksi, mengikuti uji kompetensi (fit & proper test) dengan hasil yang memuaskan
2.	Persentase ASN yang menyusun SKP Sesuai Standart			5%	10%	15%	30%	50%	16,75%	20,47%	24,51%	30%	50%	Didukung peran aktif dari OPD pengumpul SKP yang akan di evaluasi sesuai standart

2.3 Isu - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dalam penyusunan rencana kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2021, dilakukan terlebih dahulu dengan inventarisasi dan menetapkan skala prioritas permasalahan-permasalahan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang dirumuskan menjadi isu-isu penting penyelenggaraan tupoksi OPD.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Belum optimalnya jumlah rekrutmen pegawai sesuai dengan kebutuhan
2. Belum optimalnya mutasi dan promosi pegawai sesuai dengan kompetensinya
3. Belum adanya standar kompetensi jabatan pada semua jabatan
4. Pelaksanaan diklat belum sesuai kebutuhan organisasi dan individu

Tantangan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah :

1. Perubahan organisasi perangkat daerah akan berdampak pada penataan dan pengelolaan jabatan dan sumber daya manusia yang ada;
2. Adanya kelembagaan yang ditarik pengelolaannya oleh tingkat propinsi dan pusat mengakibatkan perubahan kewenangan urusan kepegawain yang ada.
3. Adanya kebijakan minus growth dimana penerimaan PNS baru harus lebih kecil dibandingkan dengan yang purna tugas (pensiun)
4. Adanya lelang terbuka jabatan bagi pejabat eselon;
5. Hingga saat ini belum dimilikinya fasilitas gedung diklat sehingga setiap melaksanakan kediklatan harus berkoordinasi dan melakukan kerjasama dengan lembaga diklat yang sudah terakreditasi;

Peluang Pengembangan Pelayanan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Blitar adalah

1. Penerapan secara konsisten peningkatan profesionalisme kompetensi dan mutasi jabatan dengan system merit melalui optimalisasi pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan *assessment center*;
2. Penerapan pengembangan evaluasi kinerja berbasis online yang akan terintegrasi dengan sistem Tunjangan Perbaikan Penghasilan pegawai berbasis kinerja dan disertai penerapan sistem *punishment* yang lebih tegas
3. Peningkatan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dan penempatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan kompetensi yang diperlukan;
4. Berupaya memenuhi standar pengakreditasi, dalam hal ini adalah kepemilikan gedung diklat.

Berikut ini disajikan mengenai isu-isu penting yang perlu mendapat perhatian, sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja SDM Aparatur dalam rangka percepatan reformasi birokrasi berdasarkan *Road Map* reformasi birokrasi pemerintah Kota Blitar dalam bidang SDM aparatur, meliputi:
 - a. Penataan jumlah dan distribusi PNS melalui Kebijakan *Minus Growth* (penerimaan CPNS lebih kecil dari jumlah PNS yang pensiun setiap tahun serta monitoring dan evaluasi redistribusi /realokasi PNS
 - b. Penguatan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan
 - c. Pembangunan *Assesment Center* yang memiliki fungsi dalam menyusun berbagai dokumen acuan bagi pengembangan pegawai, di antaranya dalam penyusunan :
 - Dokumen standar kompetensi manajerial
 - Dokumen standar kompetensi bidang
 - Metoda/alat ukur penilaian kompetensi
 - Calon pejabat struktural yang sesuai dengan standar kompetensi jabatan
 - Kamus kompetensi jabatan struktural dan fungsional di lingkungan pemerintah Kota Blitar

2.4 Review tentang Rancangan Awal RKPD

Dalam rangka meningkatnya profesionalisme aparatur menuju pemerintahan yang akuntabel dimana pada tingkat perwujudannya memerlukan sumber daya yang kompeten, profesional dalam pelayanan publik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dilandasi oleh kecerdasan emosional dan spiritual maka untuk itu diperlukan tersedianya sumber daya aparatur yang bertanggungjawab tepat fungsi dan tepat posisi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Review rancangan awal Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2019 sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana sebagaimana tabel 2.5 di bawah ini

Tabel 2.5
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021
Kota Blitar

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN					URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN					
	KEPEGAWAIAN			100 %	5.952.746.488,00	KEPEGAWAIAN			100 %	5.952.746.488,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	58.599.600,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			100%	58.599.600,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	18.225.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	18.225.000,00	
			Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	9 dokumen	40.374.600,00			Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	9 dokumen	40.374.600,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	8.290.790.431,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	8.290.790.431,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	33 orang	4.473.291.949,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	33 orang	4.473.291.949,00	
	Penyediaan Administrasi		Jumlah Pegaai Honoror/Pegawai Tidak	80 orang	3.809.778.282,00	Penyediaan Administrasi		Jumlah Pegaai Honoror/Pegawai Tidak	80 orang	3.809.778.282,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pelaksanaan Tugas ASN		Tetap yang diberikan Honorarium/Gaji			Pelaksanaan Tugas ASN		Tetap yang diberikan Honorarium/Gaji			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	12 dokumen	7.720.200,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	12 dokumen	7.720.200,00	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	373.087.500,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	373.087.500,00	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 even	123.305.100,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 even	123.305.100,00	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah publikasi program /kegiatan perangkat daerah	1 kali		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan		Jumlah publikasi program /kegiatan perangkat daerah	1 kali		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/diklat teknis dengan nilai baik	29 orang	260.782.400,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/diklat teknis dengan nilai baik	29 orang	260.782.400,00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	24 unit	34.792.800,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	24 unit	34.792.800,00	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	4 jenis	10.659.876,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	4 jenis	10.659.876,00	
	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman	1500 dos	65.601.800,00	Penyediaan Bahan Logistik		Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman	1500 dos	65.601.800,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kantor		yang tersedia			Kantor		yang tersedia			
			Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	68 jenis				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	68 jenis		
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah lembar penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia	102788 lembar 15 jenis	45.552.200,00	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah lembar penggandaan Jumlah barang cetakan yang tersedia	102788 lembar 15 jenis	45.552.200,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	720 eksemplar	6.600.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	720 eksemplar	6.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 kali	521.698.480,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	45 kali	521.698.480,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	126.000.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	126.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan	1 rekening	126.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah rekening yang terbayarkan	1 rekening	126.000.000,00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa			100%	125.842.150,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan Jasa			100%	125.842.150,00	
			Jumlah kendaraan	2 unit	66.844.750,00			Jumlah kendaraan	2 unit	66.844.750,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dinas /operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	9 unit		Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dinas /operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	9 unit		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	88 unit 56 unit	34.171.400,00 24.826.000,00 8.076.692.450,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	88 unit 56 unit	34.171.400,00 24.826.000,00 8.076.692.450,00	
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				2.438.785.550,00	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				2.438.785.550,00	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan	250 orang	1.757.371.550,00	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK		Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan	250 orang	1.757.371.550,00	
			Jumlah dokumen formasi ASN	1 dokumen				Jumlah dokumen formasi ASN	1 dokumen		
			Jumlah dokumen sumpah janji PNS	250 dokumen				Jumlah dokumen sumpah janji PNS	250 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan	250 kartu				Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan	250 kartu		
			Jumlah peserta rapat kebutuhan ASN	100 orang				Jumlah peserta rapat kebutuhan ASN	100 orang		
			Jumlah seleksi penerimaan ASN	1 kali				Jumlah seleksi penerimaan ASN	1 kali		
			Jumlah SK Pengangkatan ASN	250 SK				Jumlah SK Pengangkatan ASN	250 SK		
			Jumlah SK Pengangkatan calon ASN	150 SK				Jumlah SK Pengangkatan calon ASN	150 SK		
			Jumlah SK Perberhentian dan perpanjangan PTT	2 SK				Jumlah SK Perberhentian dan perpanjangan PTT	2 SK		
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang terbit	137 buah	72.155.300,00	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian		Jumlah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang terbit	137 buah	72.155.300,00	
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah pensiun yang memperoleh Tunjangan Hari Tua (THT) dan pensiun bulanan	137 orang				Jumlah pensiun yang memperoleh Tunjangan Hari Tua (THT) dan pensiun bulanan	137 orang		
			Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis	150 orang				Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis	150 orang		
			Jumlah SK pensiun yang terselesaikan	137 SK				Jumlah SK pensiun yang terselesaikan	137 SK		
			Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Hibah	1 lembaga	405.000.000,00			Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Hibah	1 lembaga	405.000.000,00	
			Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian	700 orang	204.258.700,00	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian	700 orang	204.258.700,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian	1400 orang	79.320.700,00	Mutasi dan Promosi ASN Pengelolaan Mutasi ASN		Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian	1400 orang	79.320.700,00	
			Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK	2100 orang	1.012.302.900,00			Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK	2100 orang	1.012.302.900,00	
	Pengembangan Kompetensi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		Jumlah peserta sosialisasi kepangkatan	75 orang		Pengembangan Kompetensi ASN Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN		-			
			Jumlah peserta sosialisasi kepegawaian	300 orang				Jumlah peserta sosialisasi kepegawaian	300 orang		
	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah SK Penempatan ASN	500 orang	4.378.270.700,00	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN		Jumlah SK Penempatan ASN	500 orang	4.378.270.700,00	
			Jumlah ASN yang mengikuti coaching dan mentoring	70 orang	1.178.074.100,00			Jumlah ASN yang mengikuti coaching dan mentoring	70 orang	1.178.074.100,00	
			Jumlah ASN yang mengikuti orietnasi ASN	250 orang				Jumlah ASN yang mengikuti orietnasi ASN	250 orang		
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi CPNS daerah	250 orang	3.200.196.600,00			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi CPNS daerah	250 orang	3.200.196.600,00	
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	29 orang				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural	29 orang		
			Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional/ Sosial Kultural/Uji	150 orang				Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional/Sosi al Kultural/Uji	150 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kompetensi					Kompetensi			
			Jumlah dokumen hasil Evaluasi Dampak Diklat (EDD)	1 dokumen				Jumlah dokumen hasil Evaluasi Dampak Diklat (EDD)	1 dokumen		
			Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi	5 orang				Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Uji Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi	5 orang		
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				247.333.300,00	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				247.333.300,00	
	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan	8 orang	247.333.300,00	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur		Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan	8 orang	247.333.300,00	
			Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan	200 orang				Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan	200 orang		
			Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja	600 orang				Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja	600 orang		
			Jumlah inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan	5 kali				Jumlah inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan	5 kali		
			Jumlah Karis/Karsu yang terbit	50 buah				Jumlah Karis/Karsu yang terbit	50 buah		
			Jumlah LHKPN yang dilaporkan	160 orang				Jumlah LHKPN yang dilaporkan	160 orang		
			Jumlah LP2P yang dilaporkan	2000 orang				Jumlah LP2P yang dilaporkan	2000 orang		
			Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti	250 orang				Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti	250 orang		
			Jumlah peserta pemanthapan tugas	200 orang				Jumlah peserta pemanthapan tugas	200 orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Jumlah peserta peningkatan motivasi pegawai	400 orang				Jumlah peserta peningkatan motivasi pegawai	400 orang		
			Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian	300 orang				Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian	300 orang		
			Jumlah SKP yang dievaluasi	1500 SKP				Jumlah SKP yang dievaluasi	1500 SKP		
			Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti	80%				Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti	80%		
			Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti	80%				Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti	80%		
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				134.735.400,00	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				134.735.400,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				134.735.400,00	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA				134.735.400,00	
	Pengembangan Kompetensi Teknis			100%	298.140.000,00	Pengembangan Kompetensi Teknis			100%	298.140.000,00	
	Penyeleenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan		Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	300 orang	298.140.000,00	Penyeleenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan		Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	300 orang	298.140.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil analisis kebutuhan					Ctt ptg
	Program/ kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintahan Umum					Pemerintahan Umum					
			Persentase ASN yang mengajukan ijin tugas belajar dan ijin belajar yang ditindaklanjuti	98%				Persentase ASN yang mengajukan ijin tugas belajar dan ijin belajar yang ditindaklanjuti	98%		
			Persentase ASN yang mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti	98%				Persentase ASN yang mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti	98%		

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari DPRD, kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun PD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program.

Tabel 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Sumber : BKD Kota Blitar Tahun 2021

Pada tahun 2022, Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Kota Blitar tidak mendapat usulan dari Musrenbang Kecamatan maupun dari pokok – pokok pikiran DPRD.



Bab III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

Kebijakan-kebijakan Nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, dimana secara operasional bidang kepegawaian tercantum dalam Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian. Adapun program nasional yang dilaksanakan Badan Kepegawaian Daerah termasuk dalam urusan wajib Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah yang telah disinkronkan dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan dari Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan. Telaahan strategis berdasarkan Rencana Strategis terhadap 2 (dua) kementerian/kelembagaan adalah sebagai berikut:

6. Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia;

Dalam perencanaan jangka menengah, BKN berkomitmen untuk membangun sistem manajemen PNS yang dituangkan dalam visi BKN 2020 – 2024 yaitu : **“Menjadi Pembina dan Penyelenggara Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Bermartabat Tahun 2025”**. Penjelasan dari visi Badan Kepegawaian Negara tersebut adalah:

- a. BKN merupakan mendatori Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara khususnya di bidang pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara nasional. Tugas BKN berkaitan dengan kewenangan penyelenggaraan Manajemen ASN, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria Manajemen ASN.
- b. Manajemen kepegawaian yang dimaksud adalah Manajemen ASN seperti tugas-tugas dalam pertimbangan teknis formasi, pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun dan penyimpangan informasi pegawai ASN yang telah dimutakhirkan oleh instansi pemerintah sertz bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi ASN.
- c. Terdapat dua nilai yang menjadi tujuan utama pembentukan karakter pegawai ASN, Yaitu :

1. Profesional

- a. BKN melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya sesuai dengan yang telah dimanahkan melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memaksimalkan sumber daya dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN secara efektif dan efisien, sebagai upaya untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
- b. BKN melakukan upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensinya sebagai lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dan pelayanan kepegawaian.

2. Bermartabat

- a. BKN melaksanakan kewenangan, fungsi dan tugas sesuai dengan koridor yang telah digaris melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. BKN berkomitmen untuk merumuskan dan mengimplementasikan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kepegawaian secara konsisten serta menjunjung tinggi etika dan nilai – nilai moral yang membentuk citra positif BKN;
- c. Menjaga integritas dan citra organisasi BKN sebagai lembaga pemerintah dalam pembinaan dan penyelenggaraan Manajemen ASN dengan menjadi lembaga terdepan dalam menerapkan prinsip profesionalisme, nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.

Rencana strategis yang dilakukan oleh BKN adalah : **“Meningkatnya Tingkat Profesionalisme Pegawai ASN “** yang diaplikasikan dengan berbagai program yang mampu mendukung yaitu:

1. Program penyelenggaraan manajemen kepegawaian negara
2. Program dukungan manajemen dan penyelenggaraan tugas teknis lainnya BKN
3. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur BKN

Tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar adalah **“Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara”**. Dalam tujuan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar 2021 – 2026 dimaksudkan bahwa aparat pemerintah Kota Blitar harus mempunyai sifat dan sikap yang disiplin, bertanggung jawab, kreatif, inovatif dan sejahtera yang didukung pengetahuan dan ketrampilan serta keahlian dengan dilandasi keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Beberapa unsur yang terkandung selaras dengan visi BKN yaitu **Mewujudkan Aparatur yang Profesional.**

2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Republik Indonesia.

Dalam perencanaan jangka menengah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki komitmen yang dituangkan dalam Visi 2020 - 2024 yaitu **“Mewujudkan Aparatur Negara yang Profesional dan Berintegritas Tinggi untuk Mencapai Pemerintahan yang Berkelas Dunia dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi presiden dan wakil presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan Gotong Royong “.** Yang mana visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Kementerian PANRB untuk menjadikan seluruh aparatur negara di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah memiliki kepribadian yang bersih dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari serta memiliki kompetensi yang dapat diandalkan untuk selalu berkinerja tinggi dalam menjalankan perannya sebagai pelayan masyarakat.

Dalam rangka mencapai visinya tersebut, kemeterian PANRB telah merumuskan dan menetapkan beberapa misi yang harus diembannya, yaitu :

1. Menciptakan Kelembagaan dan Tata Kelola Birokrasi yang Ramping, Lincah dan Terintegrasi dan Berbasis Elektronik;
2. Membangun SDM Aparatur yang Adaptif, Profesional dan Kompetitif dan Berwawasan Global;
3. Mengembangkan Sistem Manajemen Kinerja Instansi Pemerintah yang Transparan dan Akuntabel;
4. Menciptakan Sistem Pengawasan yang Profesional, Independen dan Berintegritas;
5. Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, AKuntabel dan Melayani;
6. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi

Adapun aparatur negara berkepribadian bersih dan kompeten bermakna bahwa sosok aparatur negara baik secara individu, institusional maupun sistem, mempunyai kompetensi, kemampuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas dan fungsi secara terampil, baik dan benar serta efektif dan efisien serta dilandasi dengan nilai-nilai etika, integritas, moral dan akuntabilitas untuk mewujudkan kinerja, hasil karya terbaik dan bermanfaat dalam pencapaian reformasi birokrasi. Sedangkan *Good Governance* mencerminkan cita-cita penyelenggaraan negara yang profesional, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas dan bebas KKN.

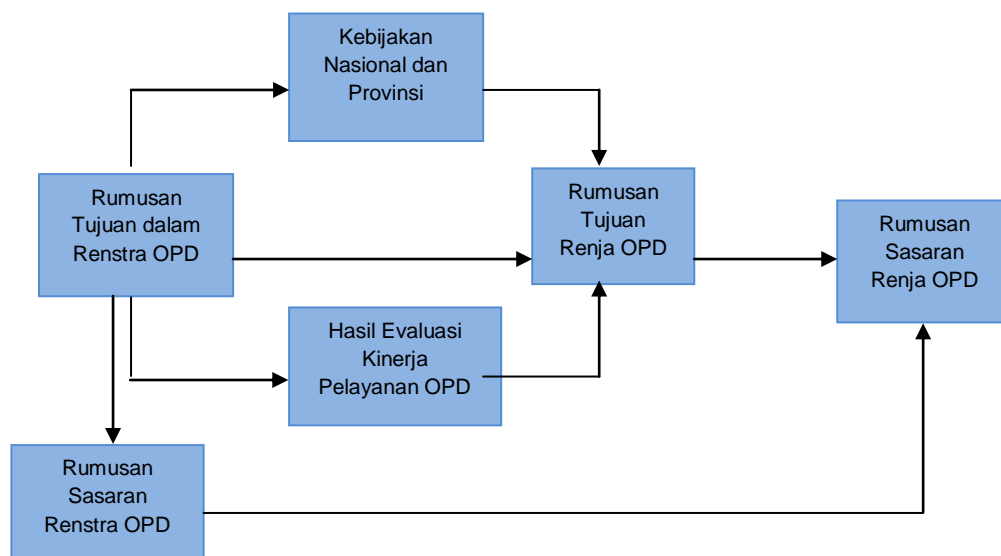
Dari hasil telaahan Visi Kemenpan dan Reformasi Birokrasi tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa Tujuan BKD Kota Blitar telah sejalan dengan visi institusi pusat tersebut.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar dimaksudkan untuk :

1. Menjabarkan Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar dalam Rencana Program/Kegiatan Prioritas Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2021;
3. Menjadikan acuan bagi seluruh bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar;
4. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan sekretariat pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar;
5. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar.

Gambar 3.1
Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Perangkat Daerah



Tujuan dan sasaran sebagai penjabaran rencana strategis merupakan instrumen pencapaian visi dan misi Kota Blitar, visi adalah cara pandang jauh kedepan yang berisikan suatu gambaran menantang tentang cita dan citra atau keadaan masa datang yang hendak diwujudkan oleh suatu instansi. Misi Kota Blitar yang menyatakan

keterkaitan dengan tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar adalah Misi ke 5, yaitu :

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih
Berbasis Teknologi Informasi”**

Misi ini diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menuju pemerintahan yang baik, bersih, professional, berbasis teknologi informasi sehingga pelayanan publik memenuhi harapan pengguna layanan.

Dalam mewujudkan misi tersebut serta mendorong upaya peningkatan kualitas sumber daya aparatur, maka tujuan organisasi serta sasaran yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar. yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan OPD
Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar**

No	Tujuan	Target Akhir Tahun Rencana (2026)	Indikator Tujuan	Formulasi Perhitungan / Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	80,50	Indeks Profesionalitas ASN	Perhitungan formulasi dengan pembobotan dari unsur : 1. Pendidikan, 2. Kompetensi ASN melalui diklat teknis, fungsional, struktural, 3. Penilaian Kinerja melalui SKP 4. Disiplin seluruh ASN

Tujuan yang ingin dicapai Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar adalah “Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara” dimana tujuan tersebut telah sesuai dengan Visi Misi Walikota terpilih dan pada RPJMD Kota Blitar. Tujuan tersebut merupakan cita-cita Badan Kepegawaian Daerah dan terus menjadi cita-cita Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar kedepan karena hal tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar 2021 - 2026.

Untuk mencapai tujuan tersebut langkah-langkah yang diambil oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar adalah dengan manajemen pegawai sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan organisasi. Manajemen pegawai yang dimaksud adalah dengan melakukan rekrutmen, penempatan dan promosi pegawai sesuai dengan analisa jabatan atau kompetensi dan kebutuhan organisasi yang ada pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

Dalam tujuan yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah mempunyai strategi – strategi dalam rangka mencapai tujuan yang

dimaksud, dengan menuangkan dalam sasaran - sasaran kegiatan guna pencapaian tujuan atau cita – cita Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar.

Sasaran - sasaran yang dirumuskan untuk mencapai tujuan Badan Kepegawaian tertuang dalam Indikator Kinerja dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026. Dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah telah merumuskan secara menyeluruh program dan kegiatan yang terintegrasi dengan indikator kinerja utama selama 5 tahun perencanaan. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tahun 2022

Tujuan	Indikator Tujuan	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022	Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2020		Target Tahun 2021	Target Tahun 2022
		Target	Realisasi					Target	Realisasi		
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara	Indeks Profesionalitas ASN	78	78,54	80,00	80,10	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	-	208	250	260
						Meningkatnya Kompetensi ASN	Peningkatan Persentase ASN yang Mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	-	8,30%	9,62%	11,32 %



Bab IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BLITAR

Rencana kerja dan pendanaan tahun 2022 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis BKD Kota Blitar untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Daerah

Memperhatikan arah kebijakan Pembangunan Daerah tahun 2022 sebagaimana tertuang dalam RKPD Kota Blitar Tahun 2022, maka dalam kaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah yaitu mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi urusan kepegawaian, BKD Kota Blitar mendukung Prioritas Pembangunan Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, berorientasi masyarakat, dan berbasis teknologi informasi. Dalam kaitan pencapaian Program Prioritas Pembangunan Daerah dimaksud, BKD berperan dalam melakukan sinkronisasi, harmonisasi monitoring dalam pencapaian target – target pembangunan bidang kepegawaian dalam rangka pencapaian target RPJMD Kota Blitar 2021 - 2026, sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
Program dan Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung
Prioritas Daerah

Prioritas Pembangunan	Program Prioritas Daerah	Kegiatan Prioritas Daerah	Prioritas PD	Program	Kegiatan
Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berorientasi Masyarakat, dan berbasis Teknologi Informasi	Blitar Melayani	Penguatan Inovasi daerah	Peningkatan Inovasi Pelayanan Kepegawaian Daerah	Program Kepegawaian Daerah	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

Sumber : BKD Kota Blitar Tahun 2021

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan Visi, Misi Kota Blitar di bidang kepegawaian serta tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian yang telah ditetapkan, Badan Kepegawaian Daerah menyusun rencana kerja tahun 2022 dan menguraikan dalam 3 (tiga) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 26 (dua puluh enam) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp **17.870.652.687** ,- (tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang berasal dari APBD Kota Blitar, dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan.
 - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, terbagi mejadi 3 (tiga) sub kegiatan
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
 - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, terbagi menjadi 6 (enam) sub kegiatan
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
 - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terbagi menjadi 3 sub kegiatan
2. Program Kepegawaian Daerah
 - Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN, terbagi menjadi 4 (empat) sub kegiatan
 - Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, terbagi menjadi 2 (dua) sub kegiatan
 - Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur, terbagi menjadi 1 (satu) sub kegiatan
3. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Kegiatan Pengembangan Kompetensi Teknis, terbagi menajdi 1 (satu) sub kegiatan.

Adapun secara garis besar uraian mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang menggambarkan jumlah program dan jumlah kegiatan, dapat dikemukakan sebagaimana tabel 4.2.

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2021 dan perkiraan maju tahun 2022 di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar, diuraikan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut :

Tabel 4.2
Rekapitulasi Program, Kegiatan Dan Pagu Indikatif
Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
Tahun 2022

NO	Organisasi Perangkat Daerah	URUSAN				NON URUSAN				URUSAN DAN NON URUSAN			
		Jumlah			Pagu Indikatif (Rp)	Jumlah			Pagu Indikatif	Jumlah			Pagu Indikatif
		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan		Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	Badan Kepegawaian Daerah	2	5	9	8.211.427.850	1	6	17	9.659.224.837	3	11	26	17.870.652.687

Tabel 4.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar
Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
5	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN									
5.03	KEPEGAWAIAN				5.952.746.488,00				6.173.500.000,00	
5.03	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	100 %	4.642.584.348,00			100 %	4.784.500.000,00	
5.03	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100%	58.599.600,00		100%	48.969.800,00	
5.03	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	10 dokumen	18.225.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	10 dokumen	18.395.000,00
5.03	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	9 dokumen	40.374.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	9 dokumen	30.574.800,00
5.03	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100%	8.290.790.431,00		100%	11.863.297.320,00	
5.03	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang Dibayarkan	33 orang	4.473.291.949,00	Dana Transfer Umum-DAU	33 orang	4.585.124.250,00
5.03	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Pegaai Honorer/Pegawai Tidak Tetap yang diberikan Honorarium/Gaji	80 orang	3.809.778.282,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	80 orang	7.270.362.870,00
5.03	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun	12 dokumen	7.720.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	12 dokumen	7.810.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	(Bulanan/Semesteran)								
5.03	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100%	373.087.500,00		100%	384.716.400,00
5.03	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	4 even	123.305.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	4 even	105.000.000,00
					Jumlah publikasi program /kegiatan perangkat daerah	1 kali			1 kali	
5.03	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bimbingan teknis/pelatihan/diklat teknis dengan nilai baik	29 orang	260.782.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	29 orang	263.500.000,00
5.03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		100%	684.905.156,00		100%	744.847.881,00
5.03	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	24 unit	34.792.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	24 unit	80.550.000,00
5.03	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	4 jenis	10.659.876,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	4 jenis	11.197.476,00
5.03	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan minuman yang tersedia	1500 dos	65.601.800,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	1500 dos	76.713.500,00
					Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	68 jenis			68 jenis	
5.03	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan	102788 lembar	45.552.200,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	102788 lembar	46.545.500,00
					Jumlah barang cetakan yang tersedia	15 jenis			15 jenis	
5.03	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan	Jumlah bahan bacaan yang	720	6.600.000,00	Dana Transfer	720	8.250.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	dan Peraturan Perundang - undangan	tersedia		eksemplar		Umum-Dana Bagi Hasil		eksemplar	
5.03	01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		45 kali	521.698.480,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		120 rakor	521.591.405,00
5.03	01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	126.000.000,00			100%	134.000.000,00
5.03	01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1 rekening	126.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 rekening	134.000.000,00
5.03	01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100%	125.842.150,00			100%	152.915.850,00
5.03	01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas /operasional yang terpelihara Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajak dan perizinannya	2 unit 9 unit	66.844.750,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2 unit 9 unit	67.147.350,00
5.03	01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	88 unit	34.171.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		88 unit	42.884.250,00
5.03	01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis perlengkapan gedung kantor yang terpelihara	56 unit	24.826.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		56 unit	42.884.250,00
5.03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			8.076.692.450,00				9.897.401.500,00
5.03	02 2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			2.438.785.550,00				3.363.853.400,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
5.03	02	2.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah ASN yang mengikuti uji kesehatan		250 orang	1.757.371.550,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		250 orang	2.677.242.900,00
				Jumlah dokumen formasi ASN		1 dokumen	1 dokumen					
				Jumlah dokumen sumpah janji PNS		250 dokumen	250 dokumen					
				Jumlah Kartu Pegawai yang diusulkan		250 kartu	250 kartu					
				Jumlah peserta rapat kebutuhan ASN		100 orang	100 orang					
				Jumlah seleksi penerimaan ASN		1 kali	1 kali					
				Jumlah SK Pengangkatan ASN		250 SK	250 SK					
				Jumlah SK Pengangkatan calon ASN		150 SK	150 SK					
				Jumlah SK Perberhentian dan perpanjangan PTT		2 SK	2 SK					
5.03	02	2.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Kartu Identitas Pensiun (KARIP) yang terbit		137 buah	72.155.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		137 buah	77.351.800,00
				Jumlah pensiun yang memperoleh Tunjangan Hari Tua (THT) dan pensiun bulanan		137 orang	137 orang					
				Jumlah peserta sosialisasi klaim otomatis		150 orang	150 orang					
				Jumlah SK pensiun yang terselesaikan		137 SK						
5.03	02	2.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Hibah		1 lembaga	405.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		1 lembaga	405.000.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
5.03	02	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang memiliki berkas data kepegawaian		700 orang	204.258.700,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		700 orang	204.258.700,00
					Jumlah ASN yang terdokumentasi dalam data digital kepegawaian		1400 orang				1400 orang	
5.03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN				79.320.700,00				210.000.000,00
5.03	02	2.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah ASN yang memproses kenaikan pangkat, berkala, PAK dan PMK		2100 orang	1.012.302.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		2100 orang	1.025.000.000,00
					Jumlah peserta sosialisasi kepegawaian		300 orang				300 orang	
					Jumlah SK Penempatan ASN		500 orang				500 orang	
5.03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN				4.378.270.700,00				5.222.082.100,00
5.03	02	2.03	01	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti coaching dan mentoring		70 orang	1.178.074.100,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		70 orang	1.422.081.100,00
					Jumlah ASN yang mengikuti orientasi ASN		250 orang				250 orang	
5.01	02	2.03	03	Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Prajabatan/Pelatihan Dasar bagi CPNS daerah		250 orang	3.200.196.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil		250 orang	3.800.000.000,00
					Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Struktural		29 orang				29 orang	
					Jumlah ASN yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional/Sosial Kultural/Uji Kompetensi		150 orang				150 orang	
					Jumlah dokumen hasil Evaluasi Dampak Diklat (EDD)		1 dokumen				-	
					Jumlah Pejabat Fungsional Yang Mengikuti Uji		5 orang				5 orang	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023		
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
		Kompetensi/Sertifikasi Kompetensi								
		Jumlah dokumen hasil Analisa Kebutuhan Diklat (AKD)		-				1 dokumen		
		Jumlah tahapan pembangunan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (balai diklat)		-				1 tahap		
5.03	02	2.04				247.333.300,00			286.467.000,00	
5.01	03	2.04	02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
				Jumlah ASN yang difasilitasi uji kesehatan		8 orang	247.333.300,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	8 orang	286.467.000,00
				Jumlah ASN yang memperoleh penghargaan		200 orang			200 orang	
				Jumlah ASN yang memperoleh kelengkapan kerja		600 orang			600 orang	
				Jumlah inspeksi mendadak (SIDAK) yang dilaksanakan		5 kali			5 kali	
				Jumlah Karis/Karsu yang terbit		50 buah			50 buah	
				Jumlah LHKPN yang dilaporkan		160 orang			160 orang	
				Jumlah LP2P yang dilaporkan		2000 orang			2000 orang	
				Jumlah pengajuan cuti yang ditindaklanjuti		250 orang			250 orang	
				Jumlah peserta pemantapan tugas		200 orang			200 orang	
				Jumlah peserta peningkatan motivasi pegawai		400 orang			400 orang	
				Jumlah peserta sosialisasi peraturan kepegawaian		300 orang			300 orang	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2022				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2023	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Jumlah SKP yang dievaluasi		1500 SKP				1500 SKP	
		Persentase kasus indisipliner yang ditindaklanjuti		80%				80%	
		Persentase pengajuan ijin cerai yang ditindaklanjuti		80%				80%	
5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			134.735.400,00				180.223877,00
5.04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			134.735.400,00				180.223877,00
5.04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis		100%	298.140.000,00		318.000.000,00
5.04	02	2.01	01	Penyeleenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis, Umum, Inti dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang dipetakan kompetensinya	300 orang	298.140.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	300 orang
					Persentase ASN yang mengajukan ijin tugas belajar dan ijin belajar yang ditindaklanjuti	98%			98%
					Persentase ASN yang mengajukan ujian dinas dan penyesuaian ijazah yang ditindaklanjuti	98%			98%
TOTAL							17.870.652.687,00		23.406.372.628,00

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2021

SUYOTO, S.

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar tahun 2022 sebagai penjabaran Renstra Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2022. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2020.

5.1 Catatan Penting

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Kota Blitar Tahun 2022, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas tahapan dan produk perencanaan maka program dan kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan yang dilaksanakan di Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing perangkat daerah.

5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022, memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2022 sesuai tugas dan kewenangannya dan menjaga keselarasan antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Guna efektivitas dan efisiensi dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaannya
3. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2022.

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Dalam menghadapi tugas perencanaan yang semakin kompleks, Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur perencanaan dalam rangka melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencana
- d. Dengan ditetapkannya Renja Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar Tahun 2022, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar tahun 2022. Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja dan memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh aparatur Badan Kepegawaian Daerah Kota Blitar sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik dimasa yang akan datang.

Blitar, Juli 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kota Blitar



SUYOTO, S.Pd., M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19631014 198403 1 004

